

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya (Febrianti & Nuraini, 2024). IPM sering digunakan sebagai salah satu indikator untuk membandingkan tingkat pembangunan manusia antar negara, yang secara tidak langsung mencerminkan perbedaan tingkat kemajuan pembangunan. IPM juga menjadi indikator penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada tujuan pendidikan berkualitas, kesehatan yang baik, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Dewi, 2025).

Meskipun tidak mampu mencakup seluruh dimensi pembangunan, IPM digunakan untuk menilai pembangunan manusia karena dianggap cukup representatif dengan mengukur tiga dimensi pokok yang mencerminkan kemampuan dasar penduduk. Tiga dimensi tersebut meliputi: umur panjang dan sehat, tingkat pengetahuan serta keterampilan, dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan guna mencapai standar hidup layak (UNDP, 1990).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lahir dari konsep pembangunan manusia yang dibuat oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 melalui laporan yang berjudul *Human Development Report* (HDR).

Dalam laporannya UNDP menjelaskan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan hanya input dari pembangunan. Oleh karena itu, tujuan utama dari pembangunan adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati umur panjang, hidup sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif

Menurut UNDP (1995, dikutip dalam Febrianti & Nuraini, 2024) paradigma pembangunan manusia terdiri atas 4 (empat) komponen utama, yaitu:

1. Produktifitas

Dengan adanya produktifitas, masyarakat harus mampu meningkatkan produktifitasnya dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bagian dari berbagai jenis pembangunan manusia.

2. Ekuitas

Dalam ekuitas, masyarakat harus mempunyai akses dalam memperoleh kesempatan yang adil. Hambatan yang ada dalam peluang ekonomi dan politik harus dihapus, yang bertujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mendapatkan manfaat dari kesempatan tersebut.

3. Kestinambungan

Akses terhadap kesempatan harus dijamin tidak hanya bagi generasi sekarang, tetapi juga generasi mendatang. Oleh karena itu, seluruh bentuk permodalan baik fisik, manusia, maupun lingkungan hidup perlu dipenuhi dan dijaga keberlanjutannya.

4. Pemberdayaan

Dilakukannya pembangunan oleh masyarakat dan masyarakat juga harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan juga proses yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya peningkatan dalam bidang kemampuan, produktifitas dan kreatifitas manusia nantinya juga akan meningkat dan hal tersebut dapat menjadikan pertumbuhan yang efektif.

2.1.1.1 *Capability Approach*

Amartya Sen merupakan salah satu tokoh yang mengembangkan konsep pembangunan manusia, seorang ekonom asal India dan penerima Nobel Ekonomi tahun 1998. Dalam bukunya yang berjudul *Development as Freedom*, Sen menekankan bahwa pembangunan harus dilihat sebagai proses untuk memperluas kebebasan substantif individu (Gumelar & Qomar, 2025). Kebebasan tersebut diukur dari fungsi (*function*) dan kemampuan (*capabilities*) seseorang. *Functions* adalah pencapaian aktual yang dilakukan atau dijalani seseorang, sedangkan *capabilities* mencerminkan kebebasan individu untuk memilih berbagai *functions* tersebut. Pendekatan ini memandang pembangunan sebagai proses memperluas pilihan-pilihan hidup sehingga manusia dapat menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Dalam pendekatan ini terdapat dua fokus utama yaitu keadilan dan perbandingan kualitas hidup. Kebebasan bukan hanya sebagai tujuan dari suatu pembangunan melainkan sebagai sasaran utama. Apabila pembangunan mampu membebaskan manusia dari permasalahan pendidikan, kesehatan, serta

menanggulangi angka kemiskinan maka pembangunan tersebut bisa dikatakan berhasil (Sukma et al., 2024).

Teori ini memberikan cara pandang yang lebih menyeluruh dan manusiawi dalam memahami kesejahteraan dan pembangunan. Dengan menekankan pada kebebasan untuk memilih dan kemampuan untuk mengejar kehidupan yang lebih bermakna, daripada hanya fokus pada pendapatan atau kekayaan saja. Pendekatan ini mendorong kebijakan yang lebih inklusif, berkeadilan dan berpihak pada pemberdayaan individu.

2.1.1.2 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Indonesia selalu mengikuti setiap pembaruan yang dilakukan UNDP dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), baik terkait perubahan indikator maupun metodologi yang digunakan. Sejak tahun 2015 hingga sekarang, Indonesia telah menerapkan metodologi terbaru yang disempurnakan oleh UNDP pada tahun 2014 sebagai acuan standar penghitungan IPM. IPM yang dihitung secara mandiri oleh Indonesia juga terdiri atas tiga dimensi seperti halnya yang disusun oleh UNDP, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Ketiga dimensi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam empat indikator, yakni umur harapan hidup saat lahir (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), serta pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Melalui indikator-indikator ini, IPM menjadi instrumen yang mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai keberhasilan pembangunan manusia di

Indonesia, sekaligus menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperlukan agar dapat mengklasifikasi kondisi pembangunan suatu negara. Dalam perhitungan IPM, setiap indikator memerlukan penetapan nilai minimum dan maksimum. Tabel berikut menyajikan standar ukuran yang digunakan oleh BPS dan UNDP.

Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Penyusun IPM

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	US\$/Rp	100 (PPS US\$)	1.007.436 (Rp)	107.721 (PPP US\$)	25.572.352 (Rp)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Adapun perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) metode terbaru menurut Badan Pusat Statistik (2015) adalah sebagai berikut:

1. Indeks Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) adalah indikator yang mencerminkan dimensi umur panjang dan kehidupan sehat. Pemilihan indikator ini berlandaskan pada kenyataan bahwa umur panjang memiliki nilai yang tak

ternilai, dan hanya dapat tercapai apabila manusia memperoleh gizi yang memadai serta kondisi kesehatan yang baik. Secara definisi, UHH merupakan estimasi rata-rata jumlah tahun yang dapat dijalani seseorang sejak lahir sepanjang hidupnya. UHH dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IUHH = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$$

2. Indeks Pengetahuan

Dimensi pengetahuan dalam IPM diukur melalui dua indikator utama, yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Kedua indikator ini mencerminkan sejauh mana masyarakat dapat mengakses pendidikan formal. HLS menunjukkan peluang yang dimiliki penduduk untuk menempuh jenjang pendidikan, sedangkan RLS menggambarkan tingkat pendidikan aktual yang telah dicapai oleh sumber daya manusia di suatu wilayah. Perhitungan harapan lama sekolah dilakukan untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas, sementara rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan jumlah tahun pendidikan yang ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas. Adapun rumus yang digunakan menghitung indeks harapan lama sekolah, yaitu:

$$IHLS = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

Sedangkan, rumus yang digunakan untuk menghitung indeks rata-rata lama sekolah adalah:

$$IRLS = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Indeks pengetahuan, diperoleh dengan menggabungkan nilai indeks harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah dengan rumus sebagai berikut:

$$IPengetahuan = \frac{IHLS + IRLS}{2}$$

3. Indeks pengeluaran

Dimensi standar hidup layak yang menggambarkan kesejahteraan dalam IPM tidak dapat menggunakan indikator UNDP berupa Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita karena data tersebut tidak tersedia di tingkat provinsi maupun kabupaten. Oleh sebab itu, dipilih indikator alternatif berupa pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan. Indikator ini dianggap paling tepat karena mampu mencerminkan tingkat pendapatan sekaligus kesejahteraan masyarakat lintas wilayah dan waktu. Rumus perhitungan indeks pengeluaran yaitu:

$$IPengeluaran = \frac{1n(pengeluaran) - 1n(pengeluaran_{min})}{1n(pengeluaran_{maks}) - 1n(pengeluaran_{min})}$$

Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung sebagai rata-rata ukur atau geometrik dari tiga indeks di atas:

$$IPM = \sqrt[3]{IUHH \times IPengetahuan \times IPengeluaran} \times 100$$

Nilai indeks yang diperoleh dari perhitungan setiap komponen berkisar antara 0 yang menggambarkan kondisi terburuk hingga 1 yang menggambarkan kondisi terbaik. Badan Pusat statistik (BPS) dalam laporannya menampilkan data dalam skala ratusan (dikalikan 100) agar lebih mudah diinterpretasikan. Setelah memperoleh hasil perhitungan, nilai tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori berikut:

- | | | |
|----|---------------|--------------------|
| 1. | Sangat Tinggi | $IPM \geq 80$ |
| 2. | Tinggi | $70 \leq IPM < 80$ |
| 3. | Sedang | $60 \leq IPM < 70$ |
| 4. | Rendah | $IPM < 60$ |

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai total seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah pada periode tertentu. PDRB menjadi indikator penting untuk melihat struktur ekonomi dan tingkat pertumbuhan wilayah. PDRB per kapita, atau total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk, adalah indikator standar yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat suatu wilayah (Amalia et al., 2023). PDRB per kapita mencerminkan kemampuan ekonomi atau pendapatan rata-rata penduduk suatu negara atau daerah pada suatu periode tertentu yang biasanya satu tahun. Sehingga PDRB per kapita dapat didefinisikan sebagai rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk di suatu wilayah dalam satu tahun (Sukirno, 2004).

PDRB per kapita dapat diukur dalam dua jenis harga, yaitu atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB per kapita atas dasar harga berlaku digunakan untuk menggambarkan kemampuan rata-rata penduduk dalam melakukan konsumsi barang dan jasa serta membandingkan tingkat kemakmuran antarwilayah pada suatu periode tertentu. Namun, ukuran ini belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sebenarnya karena

masih dipengaruhi oleh perubahan harga atau inflasi. PDRB per kapita atas dasar harga konstan dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar sehingga mampu menggambarkan perubahan pendapatan per kapita secara riil dari tahun ke tahun tanpa dipengaruhi oleh inflasi, sehingga lebih tepat digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Rizal Amrullah, 2022). Suatu masyarakat dipandang mengalami peningkatan kemakmuran apabila PDRB per kapita riil atau PDRB per kapita menurut harga konstan meningkat secara terus-menerus dari tahun ke tahun Sukirno (2004).

2.1.2.1 Teori Pertumbuhan Endogen

Menurut Romer (1986) pertumbuhan ekonomi bersumber dari faktor internal perekonomian yaitu pengetahuan, inovasi, dan modal manusia. Modal manusia sendiri merupakan input penting dalam fungsi produksi (Mankiw, 2015). Teori ini menekankan modal manusia memegang peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional. Akumulasi modal manusia dan pengetahuan dapat menghasilkan *increasing returns* melalui inovasi, spesialisasi, dan proses *learning by doing*. Pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh keputusan pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pendidikan, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi kemudian dapat mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui kenaikan pendapatan, perluasan akses layanan publik, serta penciptaan lapangan kerja (Wahyudi et al., 2023)

2.1.2.2 Pengukuran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Nilai PDRB per kapita diperoleh dengan membagi nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut (Sukirno, 2004). Dengan demikian PDRB per kapita dapat dihitung dengan menggunakan salah satu rumus berikut:

$$PDRB \text{ Per Kapita} = \frac{PDRB}{Jumlah \text{ Penduduk}}$$

PDRB mencerminkan besarnya pendapatan rata-rata yang diterima oleh penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Nilai PDRB per kapita yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pendapatan yang relatif lebih besar serta akses yang lebih luas terhadap barang dan jasa. Peningkatan pendapatan per kapita secara berkelanjutan dalam jangka panjang mengindikasikan bahwa perekonomian suatu wilayah mengalami perkembangan Amalia et al., (2023). Sukirno (2004) menyebutkan bahwa PDRB per kapita juga berfungsi sebagai alat pembanding tingkat kesejahteraan antarwilayah, karena perbedaan nilai pendapatan per kapita mencerminkan perbedaan kondisi ekonomi antar daerah.

2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang tidak bekerja, tersedia untuk bekerja, dan secara aktif mencari pekerjaan, termasuk individu yang sementara diberhentikan dan menunggu dipanggil kembali (Mankiw, 2015). Pengangguran terbuka dalam Sakernas, terdiri dari penduduk usia 15 tahun ke atas yang:

1. Tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan;

2. Tidak punya pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha baru;
3. Tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa); atau
4. Sudah punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai usaha, tetapi belum mulai bekerja/berusaha.

Pengangguran muncul ketika terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kemampuan perekonomian dalam menciptakan kesempatan kerja yang cukup untuk menyerap tenaga kerja yang siap bekerja. Dengan kata lain, pasar tenaga kerja menghadapi ketidakseimbangan, di mana jumlah tenaga kerja yang ditawarkan jauh lebih besar dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja yang tersedia.

2.1.4.1 Teori Ketenagakerjaan

Teori Keynes menjelaskan bahwa masalah pengangguran timbul disebabkan oleh adanya permintaan agregat yang rendah. Permintaan agregat merupakan seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian. Keynes mengkritik pandangan Klasik yang menyatakan bahwa peningkatan penawaran tenaga kerja akan menurunkan upah dan secara otomatis menciptakan keseimbangan pasar tenaga kerja. Menurut Keynes, penurunan upah justru dapat berdampak negatif karena upah merupakan sumber pendapatan masyarakat, sehingga penurunan upah akan menurunkan daya beli dan memperlemah permintaan agregat (Sukirno, 2004). Oleh karena itu, Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan

permintaan agregat melalui kebijakan fiskal. Hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan tingkat pendapatan masyarakat agar daya beli tetap terjaga dan kegiatan ekonomi dapat berlangsung secara optimal.

2.1.4.2 Jenis Jenis Pengangguran

Menurut Sukirno (2004) terdapat dua cara untuk menggolongkan jenis-jenis pengangguran yaitu berdasarkan sumber/penyebab yang mewujudkan pengangguran dan ciri pengangguran tersebut. Berikut jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya.

a. Pengangguran Normal atau Friksional

Pengangguran normal atau friksional merupakan kondisi ketika seseorang tidak bekerja karena sedang dalam proses mencari pekerjaan yang dianggap lebih sesuai atau lebih baik. Jenis pengangguran ini muncul akibat adanya perpindahan tenaga kerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain sehingga menimbulkan jeda waktu sebelum memperoleh pekerjaan baru.

b. Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklikal merupakan jenis pengangguran yang muncul akibat menurunnya aktivitas ekonomi. Kondisi ini terjadi ketika permintaan agregat dalam perekonomian jauh lebih rendah dibandingkan dengan penawaran agregat, sehingga perusahaan mengurangi produksi dan tenaga kerja tidak terserap secara optimal.

c. Pengangguran Struktural

Pengangguran Struktural merupakan jenis pengangguran yang timbul akibat adanya perubahan dalam struktur kegiatan ekonomi. Kondisi ini terjadi ketika sektor-sektor tertentu mengalami pergeseran atau penurunan aktivitas, sehingga

tenaga kerja yang sebelumnya terserap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Akibatnya, sebagian tenaga kerja kehilangan pekerjaan karena keterampilan yang dimiliki tidak cocok dengan arah perkembangan ekonomi baru.

d. Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi merupakan jenis pengangguran yang muncul akibat proses produksi beralih dari penggunaan tenaga manusia ke pemanfaatan mesin atau teknologi modern. Pergantian ini menyebabkan sebagian tenaga kerja kehilangan pekerjaan karena peran mereka digantikan oleh otomatisasi atau inovasi teknologi.

Berdasarkan ciri pengangguran Sukirno (2004) mengklasifikasikan menjadi empat kelompok diantaranya:

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka merujuk pada kondisi tenaga kerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Jenis pengangguran ini cukup banyak terjadi karena individu belum memperoleh pekerjaan meskipun telah berusaha secara maksimal. Situasi ini muncul ketika pertumbuhan kesempatan kerja lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Akibatnya, dalam periode waktu yang cukup panjang, sebagian orang tidak melakukan aktivitas kerja yang menyebabkan mereka menganggur secara nyata dan penuh waktu sehingga dinamakan pengangguran terbuka. Fenomena ini juga dapat timbul akibat menurunnya kegiatan ekonomi, adanya kemajuan teknologi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja, maupun karena kemunduran suatu sektor industri.

b. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran tersembunyi terjadi ketika tenaga kerja tidak dimanfaatkan secara optimal karena berbagai alasan. Salah satu contohnya adalah kondisi perusahaan yang berukuran kecil namun menampung tenaga kerja berlebihan, sehingga kegiatan produksi menjadi tidak efisien. Kelebihan jumlah tenaga kerja yang tidak sepenuhnya digunakan dalam proses kerja inilah yang digolongkan sebagai pengangguran tersembunyi.

c. Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman adalah kondisi ketika tenaga kerja tidak bekerja karena keterikatannya pada periode atau musim tertentu. Jenis pengangguran ini umumnya terjadi di sektor pertanian dan perikanan, di mana tenaga kerja hanya aktif pada saat kegiatan menanam atau panen berlangsung. Pada masa jeda di antara kedua periode tersebut, apabila mereka tidak memiliki pekerjaan lain maka tenaga kerja tersebut digolongkan sebagai pengangguran musiman.

d. Setengah Menganggur

Setengah menganggur adalah kondisi ketika tenaga kerja tidak dimanfaatkan secara penuh karena keterbatasan lapangan pekerjaan. Umumnya, kelompok ini bekerja dengan jam kerja yang jauh di bawah standar normal, yaitu kurang dari 35 jam per minggu. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari dalam seminggu, atau satu sampai empat jam sehari. Tenaga kerja dengan pola kerja seperti ini digolongkan sebagai setengah menganggur karena produktivitasnya belum optimal.

2.1.4.3 Pengukuran Tingkat Pengangguran Terbuka

Untuk mengetahui seberapa besar proporsi pengangguran dalam angkatan kerja, digunakan ukuran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT memberikan gambaran persentase penduduk yang termasuk kategori pengangguran terbuka dibandingkan dengan keseluruhan angkatan kerja. Secara sederhana, TPT dihitung dengan rumus:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Rumus ini menunjukkan bahwa TPT diperoleh dengan membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja, kemudian dikalikan seratus persen untuk mendapatkan persentase. Semakin tinggi nilai TPT, semakin besar pula proporsi angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan, dan hal ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah maupun pembuat kebijakan untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja.

2.1.4 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator pendidikan yang digunakan untuk melihat tingkat akses penduduk usia sekolah terhadap fasilitas pendidikan formal, yang tercermin dari keterlibatan penduduk usia sekolah dalam sistem pendidikan (Nastiti & Nailufar, 2023). APS menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai aksesibilitas pendidikan, karena semakin tinggi APS menunjukkan semakin banyak penduduk usia sekolah yang memperoleh kesempatan pendidikan. Sebaliknya, rendahnya APS mencerminkan adanya

hambatan seperti keterbatasan ekonomi keluarga, kurangnya fasilitas pendidikan, atau faktor sosial budaya yang menghalangi anak untuk bersekolah (BPS, 2025).

Dalam konteks pembangunan manusia, APS berhubungan erat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada dimensi pendidikan. Tingginya angka partisipasi sekolah akan meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang pada akhirnya memperkuat kualitas sumber daya manusia. Dengan sumber daya manusia yang terdidik, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan (Aprilia & Cerya, 2023). Oleh karena itu, APS tidak hanya menjadi indikator pendidikan, tetapi juga berfungsi sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah.

2.1.4.1 *Human Capital Theory*

Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*) yang dikembangkan oleh Gary S. Becker menjelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dalam modal manusia. Menurut Becker (1993), pendidikan dan pelatihan merupakan investasi terpenting dalam modal manusia karena mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas serta pendapatan di masa depan. Konsep ini memandang manusia sebagai aset produktif yang berperan penting dalam proses pembangunan ekonomi. Melalui pendidikan, individu dapat meningkatkan kualitas diri dan kapasitas kerja sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan diri, tetapi juga

sebagai investasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (Sari & Warsitasari, 2023).

Pendidikan memainkan peran penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, kesehatan adalah prasyarat bagi peningkatan produktivitas dan pendidikan yang berhasil juga bergantung pada kesehatan yang memadai. Pendidikan dan kesehatan dipandang sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan dengan peran ganda keduanya sebagai input sekaligus output yang penting dalam pembangunan ekonomi (Todaro & Smith, 2011).

2.1.4.2 Pengukuran Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penduduk usia sekolah mengikuti pendidikan formal. APS dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan total jumlah penduduk pada kelompok usia yang sama. Angka partisipasi sekolah memiliki cakupan umur dan jenjang sebagai berikut:

1. Usia 7–12 tahun → Sekolah Dasar (SD)
2. Usia 13–15 tahun → Sekolah Menengah Pertama (SMP)
3. Usia 16–18 tahun → Sekolah Menengah Atas/SMK (SMA/SMK)
4. Usia 19–23 tahun → Perguruan Tinggi

Dalam konteks penelitian ini, Angka Partisipasi Sekolah (APS) difokuskan pada kelompok usia 16–18 tahun, sehingga indikator yang digunakan adalah

persentase penduduk usia 16–18 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan menengah atas (SMA/ sederajat). Pemilihan jenjang dan kelompok usia tersebut didasarkan pada peran strategis pendidikan menengah atas sebagai tahapan penting dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia, karena pada jenjang ini individu mulai memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang lebih spesifik sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun pendidikan tinggi. APS jenjang SMA merepresentasikan bentuk investasi modal manusia yang berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Rumus perhitungan APS kelompok usia 16-18 tahun adalah sebagai berikut:

$$APS = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 16–18 tahun yang bersekolah}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia 16–18 tahun}} \times 100\%$$

Dimana:

- a. Pembilang (numerator): jumlah anak/penduduk usia sekolah 16-18 tahun yang tercatat sedang bersekolah di jenjang pendidikan formal
- b. Penyebut (denominator): jumlah seluruh penduduk dalam kelompok usia sekolah 16-18 tahun yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

2.1.6 Akses Sanitasi Layak

Akses anitasi layak merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berkaitan erat dengan kesehatan dan kualitas hidup. Akses sanitasi yang tidak layak dapat menyebabkan penyakit menular dan menurunkan harapan hidup masyarakat yang merupakan indikator kesehatan dalam IPM (Dewi, 2025). Pemenuhan kebutuhan dasar ini sangat penting karena dapat mengurangi beban kesehatan, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat kemampuan individu untuk

berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Dalam kerangka *Human Capital Theory*, kesehatan dipandang sebagai modal penting yang menentukan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia (Todaro & Smith, 2011).

Akses sanitasi layak dan perilaku kebersihan yang buruk berkontribusi terhadap 88 persen kematian anak akibat diare di seluruh dunia. Kurang terjaganya sanitasi ini mempermudah penyebaran infeksi karena pertumbuhan mikroorganisme patogen tidak terkendali. (Simanjuntak et al., 2024).

Kualitas lingkungan fisik memiliki peran penting terhadap kesehatan masyarakat. Menurut *World Health Organization* (WHO), *water, sanitation and hygiene* merupakan hak dasar manusia dan aspek kunci dalam kesehatan, kesejahteraan, dan martabat manusia. Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai merupakan bagian dari lingkungan yang sehat yang harus tersedia secara merata bagi semua lapisan.

Sanitasi yang layak mencakup fasilitas yang aman untuk pembuangan limbah dan pengelolaan air, serta bersih dari kontaminan yang dapat menyebabkan penyakit. Ketidaksesuaian dalam fasilitas sanitasi akan meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan seperti diare, kolera, dan infeksi lainnya yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap derajat kesehatan masyarakat. WHO (2018) menekankan bahwa sanitasi layak adalah fasilitas yang mampu mencegah kontak manusia dengan kotoran sehingga dapat mengurangi risiko penyakit menular.

Menurut Badan Pusat Statistik (2024), rumah tangga dikategorikan memiliki akses sanitasi layak apabila menggunakan fasilitas buang air besar dengan kloset

leher angsa yang terhubung ke tangki septik, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), atau lubang tanah sehat. Ketersediaan air bersih dan sanitasi merupakan prioritas keenam yang harus dikerjakan dengan serius agar tujuan dari SDGs tercapai (Purwaningsih et al., 2021).

2.1.6.1 Pengukuran Akses Sanitasi Layak

Pengukuran akses sanitasi layak di Indonesia mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Badan Pusat Statistik (2024), rumah tangga dikategorikan memiliki akses sanitasi layak apabila menggunakan fasilitas buang air besar dengan kloset leher angsa yang terhubung ke tangki septik, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), atau lubang tanah sehat. Selain itu, akses tersebut dapat berbentuk fasilitas pribadi, bersama dengan anggota rumah tangga lain maupun komunal, selama memenuhi standar teknis yang ditetapkan. Dengan demikian, indikator pengukuran akses sanitasi layak mencakup jenis fasilitas yang digunakan, kualitas sistem pembuangan yang tidak mencemari lingkungan, serta aksesibilitas dan keberlanjutan penggunaannya oleh seluruh anggota rumah tangga. Pengukuran akses sanitasi layak menurut Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:

$$\text{Sanitasi Layak} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah Tangga}} \times 100$$

Pengukuran akses sanitasi layak juga menjadi bagian dari indikator Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya target 6.2 yang menekankan akses universal terhadap sanitasi dan kebersihan. WHO (2018) menegaskan bahwa akses sanitasi layak harus mampu mencegah kontak manusia dengan kotoran,

sehingga pengukurannya tidak hanya melihat ketersediaan fasilitas, tetapi juga efektivitas sistem pembuangan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran akses sanitasi layak tidak sekadar menilai keberadaan sarana fisik, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan penggunaannya sebagai bagian dari standar hidup layak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada jurnal serta artikel ilmiah terdahulu yang relevan dengan topik. Kajian terdahulu tersebut digunakan sebagai bahan perbandingan sekaligus untuk memperkuat hasil analisis yang dilakukan.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Peneliti dan Tahun	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<i>Determinants of Human Development Index (HDI): A Regression Analysis of Economic and Social Indicators</i> (Kuldeep Singh, Sumanth Cheemalapati, Srikanth Reddy, RamiReddy, George Kurian, Prathamesh Muzumdarman d Apoorva Muley, 2025)	• Y: IPM • X: Pendapatan per kapita (PDRB per kapita)	• X: rata-rata lama sekolah dan angka kematian bayi • Model penelitian: analisis regresi linear berganda 94 negara	Pendapatan per kapita (PDB per kapita) dan rata-rata lama sekolah berpengaruh positif signifikan sedangkan angka kematian bayi berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM	<i>Asian Journal of Economics, Business and Accounting</i> Volume 25, Issue 1, Page 26-34, 2025; Article no. AJEBA.12 7030 ISSN: 2456-639X

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	<i>Cross-mapping interactions between access to water and sanitation, human and economic development in the least developed countries</i> (Adriana Tiron-Tudor, Simona A. Apostu, Adela Socol, Oana-Raluca Ivan, 2025)	• Y: IPM • X: sanitasi	• Y: Human Asset Index (HAI) • X: urbanisasi, investasi asing langsung, akses air bersih dan angka kelahiran • Model analisis: Panel VAR dan Granger Causality • 22 negara LDC periode 2003–2019	Urbanisasi, akses air bersih, dan sanitasi berpengaruh kausal positif terhadap pembangunan manusia (HDI dan HAI)	<i>Sec. Environmental Economics and Management</i> Volume 13 - 2025
3	<i>The Role of Infrastructure Investment on Inclusive Growth and Human Development Index: Evidence from Emerging Economies</i> (Timothy O. Aluko, Bhekabantu Sifiso Ngubane, 2024)	• Y: IPM • X: akses sanitasi layak dan angka partisipasi sekolah (APS) • Model penelitian: analisis regresi data panel	• X: akses air, listrik, transportasi udara, telepon seluler • 5 negara tahun 2006-2019.	Infrastruktur transportasi udara berpengaruh positif signifikan, air, sanitasi, listrik dan angka partisipasi sekolah berpengaruh positif tidak signifikan sedangkan variabel telepon seluler berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPM.	<i>International Journal of Economics and Financial Issues</i> , 2024, vol. 14, issue 6, 219-231
4	<i>Enhancing Human Development Quality in Indonesia: Socio-</i>	• Y: IPM • X: tingkat pengangguran terbuka (TPT) • Model	• X: kemiskinan, PDRB, Indeks Pembangunan TIK (ICT Development	Pengangguran dan kemiskinan, berpengaruh negatif signifikan,	Etikonomi Volume 23(1), 2024: 93 - 108 P-ISSN:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Economic and Technological Capabilities</i> (Ika Yuli Setyowati, Nazaruddin Malik, Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, 2024)	analisis: regresi data panel	Index), serta ICT Skill • 34 provinsi di Indonesia periode 2015-2022	PDRB berpengaruh negatif tidak signifikan, Indeks Pembangunan TIK) dan proporsi remaja dan orang dewasa berusia 15–59 tahun dengan keterampilan TIK berpengaruh positif signifikan terhadap IPM Indonesia.	1412-8969; E-ISSN: 2461-0771
5	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali (Yovita Valentina Dewi & Luh Gede Meydianawathi, 2025)	• Y: IPM • X: akses sanitasi layak • Model analisis: regresi data panel	• X: pertumbuhan ekonomi (%) dan kemiskinan • Provinsi Bali selama periode 2014–2023.	Rata-rata lama sekolah dan akses sanitasi layak berpengaruh positif signifikan sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPM.	<i>Business and Investment Review (BIREV)</i> Vol. 3 No. 6 2025 ISSN 2986-7347
6	Kualitas Pembangunan Manusia Di Wilayah Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku (Fitri Febrianti & Ida Nuraini, 2024)	• Y: IPM • X: Tingkat pengangguran terbuka (TPT) • Model analisis: regresi data panel	• X: pengeluaran perkapita dan gini ratio • Kepulauan Papua dan Maluku 2014-2020	Pengeluaran perkapita berpengaruh positif signifikan, gini ratio berpengaruh negatif tidak signifikan, sedangkan tingkat pengangguran terbuka	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 24, No.1 Juli 2024 P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN: 2598-0157

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM.	
7	<i>Human Development Gaps: Evidence from Eastern Indonesia</i> (Siti Amalia, Agus Iwan Kesuma, Auliansyah, Yesi Aprianti & Adi Wijaya, 2023)	• Y: IPM • X: PDRB per kapita • Model analisis: regresi data panel	• X: jumlah penduduk miskin, harapan lama sekolah, angka harapan hidup • 5 provinsi dengan 159 kab/kota di kawasan timur indonesia 2012-2022	PDRB per Kapita, harapan lama sekolah dan angka harapan hidup secara parsial berpengaruh positif signifikan, sedangkan jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM	<i>International Review of Social Sciences Research Volume 3 Issue 3</i> September 2023 ISSN: 2782-9235
8	Pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS) Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia (Anggi Wida Nastiti, Fanny Nailufar, 2023)	• Y: IPM • X: angka partisipasi sekolah (APS)	• X: tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) • Model analisis: regresi linear berganda • Indonesia periode 2012-2021	APS berpengaruh positif signifikan sedangkan TPAK memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPM	Jurnal Ekonomi Regional Unimal, Volume 06 Nomor 3 2023 E-ISSN: 2615-126X
9	Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Periode 2015-	• Y: IPM, • X: PDRB per kapita	• X: rata-rata lama sekolah dan kemiskinan • Model analisis:	PDRB per kapita dan rata-rata lama sekolah berpengaruh positif	EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.4,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2023 (Yolla Rahmawati, Ruth Eviana Hutabarat, 2025)		regresi linear berganda	signifikan, sedangkan variabel kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM	No.3, Maret 2025
10	Analisis Pengaruh Indeks Pengangguran, Indeks Pelayanan Kesehatan dan Indeks Pendidikan Terhadap IPM di Kabupaten Bojonegoro (Nurulita Meita Putri, Sri Muljaningsih, 2022)	• Y: IPM • X: Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	• X: indeks kesehatan dan indeks pendidikan • Model analisis: regresi linear berganda • Kabupaten Bojonegoro, periode 2010-2020	Pengangguran terbuka memiliki pengaruh negatif tidak signifikan, sedangkan indeks pendidikan memiliki pengaruh yang positif signifikan kemudian untuk indeks kesehatan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPM	<i>Equity: Jurnal Ekonomi</i> Vol. 08 No (01): 06-2022, Juni 2022 p-ISSN: 1978-3795; e-ISSN: 2721-6721
11	<i>The Influence of School Participation Rates and Poverty on the Human Development Index in Indonesia 2019</i> (Fitri Andriani Setyowati, Suryo Ediyono, 2021)	• Y: IPM • X: angka partisipasi sekolah (APS)	• X: kemiskina • Model analisis regresi linear berganda • 34 provinsi di Indonesia tahun 2019	Angka partisipasi sekolah dan kemiskinan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM	<i>Advances in Social Science, Education and Humanities Research</i> , Vol. 584 – <i>Proceedings of ICoRSH 2020</i> (Atlantis Press) ISSN: 2352-5398
12	Pengaruh Pengangguran dan	• Y: IPM • X: tingkat penganggu	• X: Pertumbuhan Ekonomi	Pengangguran berpengaruh negatif	<i>Peradaban Journal Of Economic</i>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia :Pengalaman Dari Kabupaten Bojonegoro (Dados Susilowati & Adianita (2023))	ran terbuka (TPT)	• Model analisis: regresi linear berganda • Kabupaten Bojonegoro 2006-2020	tidak signifikan, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM	<i>and Business</i> ISSN 2829-1441 Vol. 2, No. 1 (2023), Page 77-98
13	Pengaruh Tingkat Partisipasi Sekolah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Angka Harapan Hidup Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Tahun 2018-2021(Layli Nur Indah Sari dan Wahyu Dwi Warsitasari, 2023)	• Y: IPM • X: angka partisipasi sekolah (APS) • Model analisis: regresi data panel	• X: tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) • Provinsi Papua 2018-2021	Angka partisipasi sekolah dan angka harapan hidup berpengaruh positif signifikan, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM	Manajemen , Akuntansi dan Perbankan Syari'ah Vol. 12 No. 1, 2023 e-ISSN: 258081XX; p-ISSN: 2527637X
14	<i>Government Expenditure Development in Indonesia</i> (Maharda & Aulia, 2020)	• Y: IPM • X: PDRB per kapita • Model analisis: regresi data panel	• X: Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan, total pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan dan pendidikan, angkatan kerja	Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh positif signifikan, sementara pengeluaran pemerintah untuk kesehatan	Jambura <i>Equilibrium Journal</i> , Volume 2. Number 2. July 2020 P-ISSN 2655-9110 E-ISSN 2656-0445

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			• 12 provinsi IPM rendah 2010-2018	berpengaruh positif tidak signifikan, PDRB per kapita berpengaruh positif signifikan, kemudian angkatan kerja dan pengeluaran rumah tangga kesehatan dan pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM	
15	Analisis Pengaruh Sanitasi dan Akses Air Bersih Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah (Fita Purwaningsi, Suharno, Abdul Aziz Ahmad., 2021)	• Y: IPM • X: Sanitasi • Model analisis: regresi data panel.	• Akses air bersih, kemiskinan, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi • Provinsi Jawa Tengah	Sanitasi, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan sedangkan Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan kemudian akses air bersih tidak berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah	Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(1), Februari 2021, 56-60 ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v21i1.1210
16	Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Anggaran	• Y: IPM • X: PDRB Perkapita • Model analisis:	• X: Anggaran sektor kesehatan, Anggaran sektor	PDRB per kapita berpengaruh positif signifikan	Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) Vol. 6, No. 1, Februari

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Se-Kabupaten Di Pulau Madura (Rizal Amrullah, 2022)	regresi data panel	Pendidikan • Kab/Kota Pulau Madura	sementara anggaran sektor kesehatan berpengaruh negatif tidak signifikan. Sebaliknya, anggaran sektor pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM di seluruh kab/kota di Pulau Madura.	2022, pp. 90-98 https://doi.org/10.22222/jie.v6i1.19816

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan PDRB Per Kapita dengan Indeks Pembangunan Manusia

Romer (1986) menegaskan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat bergantung pada pengetahuan, inovasi, dan modal manusia. Peningkatan PDRB per kapita memberikan kapasitas bagi masyarakat dan pemerintah untuk berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan inovasi. Investasi ini meningkatkan akumulasi modal manusia, yang pada gilirannya tercermin dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagai indikator kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Berbagai temuan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan PDRB per kapita akan mendorong perbaikan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kemampuan daya beli dalam memenuhi standar hidup layak. Penelitian oleh Amalia et al., (2023) Singh dan Cheemalapati, (2025) serta Rahmawati dan Hutabarat, (2025) menunjukkan PDRB per kapita memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM.

Berdasarkan penjelasan teori dan penelitian terdahulu, peningkatan PDRB per kapita akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak yang merupakan komponen pembentuk IPM. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PDRB per kapita memiliki pengaruh positif terhadap IPM.

2.3.2 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Indeks

Pembangunan Manusia

Menurut teori Keynesian, pengangguran yang tinggi mencerminkan rendahnya aktivitas ekonomi dan permintaan agregat. Kondisi pengangguran menyebabkan penurunan pendapatan rumah tangga, yang selanjutnya berdampak pada menurunnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan. Rumah tangga yang mengalami pengangguran cenderung mengurangi pengeluaran untuk pendidikan, seperti biaya sekolah, serta pengeluaran untuk pemeliharaan kesehatan dan gizi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia, yang tercermin dari capaian IPM.

Berbagai penelitian sebelumnya oleh Setyowati et al. (2024) serta Febrianti dan Nuraini (2024) menunjukkan arah hubungan negatif pengangguran terhadap IPM. Peningkatan pengangguran terbuka menyebabkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak menjadi terbatas, sehingga berpotensi menurunkan capaian IPM.

Berdasarkan penjelasan teori dan temuan penelitian terdahulu, dapat ditegaskan bahwa pengangguran merupakan salah satu keterbatasan utama dalam peningkatan pembangunan manusia. Ketika pengangguran meningkat, maka kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup layak akan terhambat. Dengan demikian, pengangguran terbuka memiliki pengaruh negatif terhadap capaian IPM.

2.3.3 Hubungan Angka Partisipasi Sekolah dengan Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Becker (1993), pendidikan merupakan bentuk investasi modal manusia yang dapat meningkatkan produktivitas individu. Pendidikan yang lebih baik juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan kualitas hidup, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan manusia secara menyeluruh. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator yang mencerminkan tingkat keterlibatan penduduk usia sekolah dalam sistem pendidikan formal. Peningkatan APS menunjukkan membaiknya akses dan partisipasi pendidikan, yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan dimensi pendidikan dalam IPM.

Berbagai peneliti telah mengkaji hubungan antara angka partisipasi sekolah dengan IPM. Penelitian oleh Aluko dan Bhekabantu (2024), Nastiti dan Nailufar (2023), Setyowati dan Ediyono (2021) serta Sari dan Warsitasari (2023) menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah memiliki hubungan yang positif terhadap IPM.

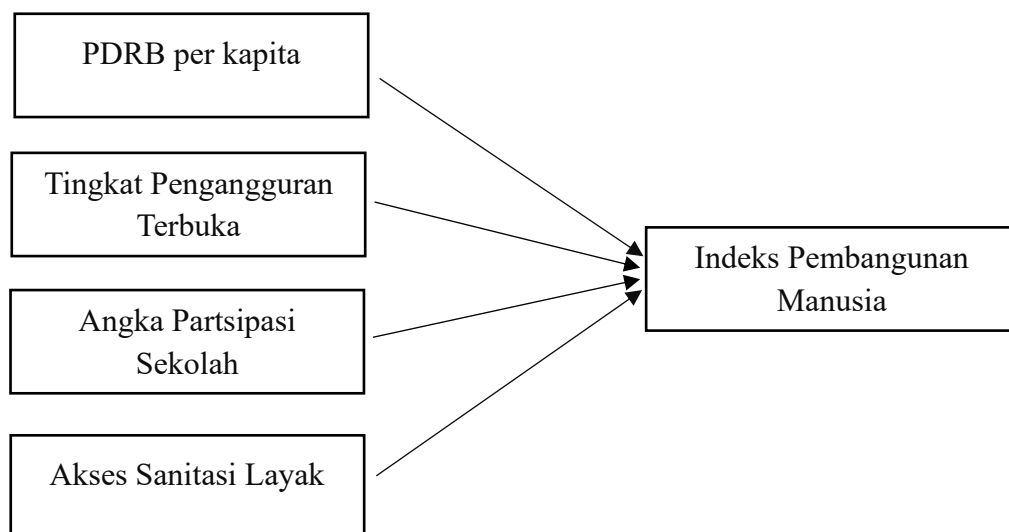
Berdasarkan penjelasan teori dan penelitian terdahulu, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendorong peningkatan IPM. Oleh karena itu, peningkatan APS merupakan salah satu faktor strategis dalam upaya meningkatkan pembangunan manusia. Dengan demikian, angka partisipasi sekolah memiliki pengaruh positif terhadap IPM.

2.3.4 Hubungan Akses Sanitasi Layak dengan Indeks Pembangunan Manusia

World Health Organization (2018) menyebutkan bahwa sanitasi yang layak merupakan indikator penting dalam peningkatan kesehatan di masyarakat dan menjadi salah satu fondasi utama pembangunan. Masyarakat dengan kondisi sanitasi yang baik cenderung memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi, sehingga mampu beraktivitas dan bekerja secara lebih produktif. Todaro dan Smith (2011) menegaskan bahwa kesehatan merupakan faktor yang menentukan kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh oleh Tiron-tudor et al (2025), Aluko dan Bhekabantu (2024), Dewi (2025) serta Purwaningsih et al. (2021) menunjukkan bahwa akses sanitasi layak memiliki pengaruh yang positif terhadap IPM. Peningkatan akses sanitasi layak dapat memperbaiki harapan hidup yang secara otomatis akan meningkatkan capaian IPM.

Dari penjelasan teori dan penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa akses sanitasi layak mempunyai pengaruh yang positif terhadap IPM. Semakin tinggi tingkat akses sanitasi layak di suatu wilayah, semakin besar peluang peningkatan IPM secara berkelanjutan.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial PDRB per kapita, Angka Partisipasi Sekolah dan Akses Sanitasi Layak berpengaruh positif sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia tahun 2015-2024.
2. Diduga secara bersama-sama PDRB per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka Partisipasi Sekolah dan Akses Sanitasi Layak berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia tahun 2015-2024.